

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik yaitu mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing- masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Belanja Modal). Namun realitanya penerimaan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal. Hal ini dapat diamati dari serapan anggaran di Jawa Tengah. Beberapa daerah di Jawa Tengah serapan anggaran modalnya masih dinilai rendah, yaitu 54%.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi

umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Rendahnya belanja modal di Kabupaten Semarang, dikarenakan pengaruh tingginya belanja pegawai yang mencapai Rp 974,7 miliar dari APBD Kabupaten Semarang 2016 sebesar Rp 1,9 triliun. Pengaruh lain dari masih rendahnya belanja modal karena ada bantuan keuangan dan bagi hasil untuk desa yang nilainya mencapai Rp 244 miliar, mengenai jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Modal (Setiawan, 2015).

Pada tahun 2017 serapan anggaran di Jawa Tengah yakni Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung di nilai masih rendah, karena jumlah anggaran yang terserap hanya mencapai 54 persen. Jawa Tengah sendiri adalah provinsi yang luas dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota yang kemandirian dan kemampuan fiskalnya berbeda-beda. Jika anggaran mencapai 90 persen maka anggaran tersebut dikatakan membaik (Ferry, 2017).

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika

Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar- besarnya (Nuarisa, 2013).

Setiap daerah mempunyai kemampuan berbeda- beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya, hal tersebut menimbulkan adanya ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana daerah setempat yang mana belum mencapai standar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentase

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH yaitu untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dalam beberapa waktu berjalan, proporsi Dana Bagi Hasil terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi. Sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) digunakan untuk belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. SiLPA ini mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kelanjutan. Jumlah SiLPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian SiLPA sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sebagian atau seluruh SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal menurut penelitian Permatasari (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Wandira (2013) yang berhasil membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) terkait pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nuzana (2016) yang mengatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuzana (2016) dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2016) dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nuzana (2016) bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hal yang sama juga dapat dilihat dari penelitian Nuzana (2016) terkait pengaruh SiLPA terhadap belanja modal yang menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Menurut Aditya & Dirgantari (2017) terkait pengaruh SiLPA terhadap belanja modal yang menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kepada Belanja Modal (BM) terlihat masih terdapat research gap yang berupa perbedaan hasil penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba kembali mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (BM).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nuzana (2016) penelitian ini akan memakai sampel pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan sampel Provinsi Jawa Tengah dikarenakan melihat adanya kondisi Belanja Modal dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu kurang diperhatikan, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2014-2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuzana (2016) dilakukan pada Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikarenakan belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan observasi memakai judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
5. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengalokasian belanja modal pada Kab/Kota di provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada publik.